

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Multikulturalisme berperan penting dalam masyarakat untuk menekankan penerimaan terhadap realitas keagamaan dan pluralitas (Azra, 2007). Masyarakat Indonesia yang pluralis dan rentan terhadap konflik, memerlukan pemahaman yang baik tentang multikulturalisme. Multikulturalisme dibutuhkan untuk memperkuat integrasi nasional yang sejauh ini masih dipengaruhi oleh sikap primordialisme yang menekankan pertahanan terhadap egoisme budaya dan regionalisme (Budiono, 2021). Multikulturalisme relevan dan berdampak luas dalam ranah sosial, budaya, politik, dan ekonomi, karena paham ini menjadi fondasi budaya yang erat kaitannya dengan pencapaian *civility* (keadaban), yang merupakan elemen dasar dalam mewujudkan demokrasi yang beradab. Dalam konteks pembangunan budaya toleransi, asimilasi, dan kesetaraan hak, paham multikulturalisme memegang peranan krusial (Budiono, 2021).

Pluralitas di Indonesia sering kali menjadi sebab timbulnya permusuhan antar kelompok, yang sering kali menghasilkan konflik dan gesekan atas dasar etnis, kesukuan, kelompok dan agama (Hati, 2020). Hasil survei Wahid Foundation (2020), menunjukkan peningkatan kasus intoleransi di Indonesia, termasuk pelecehan, diskriminasi, dan kekerasan berbasis agama atau etnis, menekankan urgensi mendesak untuk meningkatkan pemahaman terhadap multikulturalisme. (Khadafi & Mardiasih, 2021). Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat terdapat 379 anak sekolah menjadi korban kekerasan fisik dan perundungan, serta 31 kasus diskriminasi dan intoleransi selama Januari-Agustus

2023, (BBC News Indonesia edisi 21 September 2023). Selain itu, kasus diskriminasi rasial dan kekerasan masih terjadi di Papua (VOA Indonesia, 2020 dan 2024), dan diskriminasi agama terjadi terhadap Organisasi Masyarakat (Ormas) Garis di Cianjur (Kumparan, 2022).

Konflik terkait Multikultural masih bersifat aktif karena adanya dominasi satu kelompok terhadap yang lain, terutama dalam konteks Indonesia yang mengenal adanya mayoritas dan minoritas berdasarkan suku dan agama. Kelompok mayoritas yang mendominasi dengan jumlah besar memiliki kemampuan untuk mengendalikan struktur sosial, menjadi penyebab utama dari ketegangan. Sumber intoleransi juga dapat berasal dari berbagai faktor, seperti ketidakpahaman terhadap perbedaan agama dan budaya, politik identitas, ideologi keagamaan yang konservatif, fanatisme dan pandangan sempit terhadap pluralitas masyarakat (Khaerun & Ardini, 2021).

Agama sebagai faktor utama konflik melibatkan simbol, identitas, dan ideologi keagamaan. Adanya perbedaan keyakinan memicu polarisasi kelompok dan persaingan atas supremasi agama, memperjuangkan tujuan tertentu dengan dalih keagamaan, perbedaan interpretasi dan sempitnya pemahaman terhadap ajaran agama, serta persaingan kepentingan seperti ekonomi dan politik (Utomo, 2016). Dengan demikian pendidikan agama memainkan peranan penting dalam menciptakan kesadaran multikulturalisme untuk mencegah terjadinya konflik.

Pendidikan Agama Islam (PAI) selaras dengan Pendidikan Multikultural secara konseptual-normatif sebagai upaya untuk membangun dan menumbuhkan sikap kebinekaan berupa toleransi di kalangan peserta didik (Weber, 2002). Pendidikan Agama Islam seyogianya menjadi sumber nilai untuk multikulturalisme

karena dalam PAI diajarkan untuk memahami konsep keragaman. Misalnya, melalui QS. Al Hujurat ayat 13, siswa diajarkan untuk menghindari prasangka negatif dan menghargai keragaman melalui pembentukan sikap simpati, penghargaan, hormat, dan empati terhadap perbedaan suku, bangsa, ras, budaya, dan agama (Noor, 2022). Dengan demikian, PAI mampu mengurangi dampak negatif dari keberagaman budaya, seperti konflik SARA, sejalan dengan visi Islam sebagai *rahmatan lil'alam*. Pendidikan berperan strategis dalam membangun masyarakat yang mengadopsi multikulturalisme sebagaimana UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 menekankan pendidikan demokratis, adil, menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa (Mustafida, 2020).

Sebagai sekolah umum, keberagaman adalah hal yang tidak bisa dihindari. Komposisi masyarakat sekolah khususnya siswa di SMAN 14 Jakarta mencerminkan lingkungan sekolah yang multikultur, dengan 83% beragama Islam, 15% beragama Kristen, dan 2% Hindu dan Buddha. Hal ini juga tercermin dalam keberagaman di kalangan guru. Selain aspek agama atau kepercayaan, keberagaman di SMAN 14 Jakarta juga dapat terlihat dari aspek suku dan budaya meliputi suku Betawi, Jawa, Jawa-Betawi, Jawa-Sunda, Sunda, Minang, Jawa-Batak, Melayu-Cina, Aceh-Cirebon, Betawi-Manado, Palembang, dan sebagainya (Wawancara dengan siswa). Adanya keragaman agama, budaya, maupun suku pada suatu lembaga telah menandakan suatu lingkungan yang multikultur.

SMA Negeri 14 Jakarta merupakan salah satu sekolah yang mengadopsi nilai pendidikan Multikultural. Pendidikan Multikultural di SMA Negeri 14 Jakarta dituangkan melalui visi misi sekolah yang bertujuan mengembangkan sikap toleransi, empati dan kerja sama dalam masyarakat multikultur. menjunjung tinggi

nilai-nilai budaya bangsa, Sebagaimana SMA umum lainnya, Pendidikan Agama Islam (PAI) menjadi bagian integral dari kurikulum, disampaikan pada setiap jenjang melalui tatap muka selama 3 JP dengan indikator yang telah ditetapkan. Sebagaimana amanah Kurikulum Merdeka, untuk membentuk karakter pelajar Indonesia yang berkebinekaan global dan terbuka dalam berinteraksi dengan budaya multikultur, apakah PAI yang diajarkan di sekolah ini telah memberikan kontribusi terhadap pengembangan kesadaran multikulturalisme?. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut akan dilakukan dengan judul **“Kontribusi Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Dalam Memperkuat Nilai-Nilai Multikulturalisme (Studi SMA Negeri 14 Jakarta)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pentingnya multikulturalisme dalam menekankan penerimaan pluralitas.
- 2) Rendahnya pemahaman tentang multikulturalisme mengakibatkan rentannya konflik di masyarakat.
- 3) Multikulturalisme berperan memperkuat integrasi nasional.
- 4) Sempitnya pemahaman agama sering kali menjadi sebab terjadinya konflik.
- 5) PAI menjadi sumber nilai untuk multikulturalisme.
- 6) Pendidikan Agama Islam berperan untuk membangun pemahaman mengenai pluralitas dan multikulturalisme di masyarakat.
- 7) Kontribusi Pendidikan Agama Islam dalam memperkuat nilai-nilai multikulturalisme.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, pembahasan dalam penelitian ini akan difokuskan dan diarahkan pada “Kontribusi Pendidikan Agama Islam Dalam Memperkuat Nilai-Nilai Multikulturalisme”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas, rumusan pada penelitian ini adalah “Bagaimana kontribusi Pendidikan Agama Islam dalam memperkuat nilai-nilai multikulturalisme (Studi SMA Negeri 14 Jakarta)”. Adapun rumusan penelitian di atas dapat dibagi menjadi beberapa pertanyaan, sebagai berikut:

- 1) Bagaimana kontribusi Pendidikan Agama Islam dalam penguatan sikap toleransi?
- 2) Bagaimana kontribusi Pendidikan Agama Islam dalam penguatan sikap empati?
- 3) Bagaimana kontribusi Pendidikan Agama Islam dalam penguatan solidaritas?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan pada penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis “Kontribusi Pendidikan Agama Islam dalam memperkuat nilai-nilai multikulturalisme pada siswa di SMA Negeri 14 Jakarta”. Tujuan di atas dapat diturunkan menjadi beberapa tujuan antara; yaitu:

- 1) Mendeskripsikan dan menganalisis kontribusi Pendidikan Agama Islam dalam memperkuat sikap toleransi.

- 2) Mendeskripsikan dan menganalisis kontribusi Pendidikan Agama Islam dalam memperkuat sikap empati.
- 3) Mendeskripsikan dan menganalisis kontribusi Pendidikan Agama Islam dalam memperkuat solidaritas.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini secara praktis bermanfaat bagi:

a) Guru

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai media atau alat evaluasi bagi tenaga pendidik untuk menciptakan proses pembelajaran yang lebih efektif dan inklusif.

b) Sekolah

Dapat digunakan untuk pengembangan program pelatihan keterampilan tenaga pendidik, pembuatan kebijakan-kebijakan sekolah dan pengembangan lingkungan sekolah yang heterogen.

c) Lembaga Pemerintah

Digunakan untuk pengembangan kebijakan baru dalam bidang pendidikan maupun kebijakan kurikulum.